

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Hubungan antara Australia dan Timor Leste sudah terjalin sejak lama, Australia mulai menanamkan pengaruhnya sejak proses referendum pada pertengahan 1999 hingga kini pengaruh yang di berikan kepada Timor Leste secara immaterial adalah memberikan dukungan diplomatis dan memberikan dukungan politik di PBB dan memberikan keleluasaan pada Timor Leste.

Hubungan Timor Leste dengan Australia di mulai pada 20 Mei 2002, namun hubungan antara kedua negara sudah terjalin sejak pada masa Timor Leste berintegrasi dengan Indonesia dan isu politik yang muncul antara kedua negara adalah pembagian batas Maritim di Celah Timor. Setelah Timor Leste secara resmi menjadi sebuah negara merdeka, isu utama antara kedua negara tersebut tetap sama seperti sebelumnya yaitu bagaimana membagi batas Wilayah kedua negara di Celah Timor yang pada masa penjajahan di tinggalkan tanpa batas oleh ketiga negara yaitu Timor Portugis, Indonesia dan Australia karena Portugis sebagai administratif Timor Leste pada saat itu menolak klaim Australia bahwa ujung benua Australia berakhir sekitar 150 km dari laut Timor dalam perundingan batas maritim ketiga negara (Timor Portugis, Indonesia dan Australia).

Timor Leste sebagai negara berdaulat menginginkan pengakuan Internasional terhadap Wilayah integritas, maka Timor Leste mengajak Australia untuk perundingan penentuan masalah batas kedua negara namun perdana menteri Jhon

howord menolaknya dengan alasan bahwa pembicaraan batas laut itu membutuhkan waktu yang lama dan sebagai tindak lanjutnya maka pada bulan maret 2002 pemerintah Australia menarik diri dari keanggotaan ICJ yang mengakibatkan perundingan batas laut akan lebih lama lagi karena tidak ada tempat bagi kedua negara atau Timor Leste untuk mengadukan masalah batas laut. Fenomena ini menarik untuk di bahas karena lemahnya implementasi hukum laut dalam penentuan batas laut oleh Timor Leste dengan Australia. Leste Mari Alkatiri dan Perdana Menteri Australia Alexandre Downe.

Australia merupakan negara pengimpor minyak namun memiliki industri perminyakan yang sangat maju. Timor Leste merupakan negara baru yang masih melakukan penataan di berbagai bidang sehingga belum memiliki pengalaman maupun infrastruktur yang berkaitan dengan industri perminyakan, namun pendapatan negara Timor Leste sangat bergantung dari penghasilan proyek minyak dan gas. Kenyataan ekonomi inilah yang memaksa pemerintah Timor Leste untuk bekerjasama dengan pemerintah Australia dalam mengelola proyek Greater Sunrise. Kesepakatan mengenai batas maritim kedua negara belum tercapai, namun kerjasama ini memungkinkan perusahaan-perusahaan internasional maju dengan proyek-proyek minyak dan gas, sehingga akan memberikan penghasilan tambahan kepada kedua negara. Keadaan interdependensi ekonomi akan mengekang negara untuk tidak merusak hubungan politik dengan mitranya, karena biaya ekonomi. Semakin besar hubungan saling ketergantungan antara Australia dan Timor Leste, maka semakin besar

kepentingan untuk mempertahankan hubungan politik guna mempertahankan interaksi-interaksi ekonomi di antara kedua negara.

#### 4.1. Saran

Beberapa hal yang akan di rekomendasikan disini yaitu :

Pemerintah Timor Leste khususnya otoritas perminyakan Nasional Timor Leste sebagai lembaga perminyakan Timor Leste yang berdiri di atas perjanjian laut Timor antara Timor Leste dengan Australia tahun 2002 dalam mengatur perminyakan di Laut Timor harus memegang prinsip transparan dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas untuk memastikan pendapatan demi biaya pembangunan Timor Leste.

Timor Leste harus bersih tegas dalam menegosiasikan dengan Australia untuk pipe line dari ladang gas greater sunrise di tarik ke Timor Leste karena pipe line di tarik ke Timor Leste maka akan memberikan keuntungan kepada masyarakat karena berdasarkan estimasi akan membuka lapangan kerja bagi 4000 lebih tenaga kerja Timor Leste selama di adakan konstruksi *Liquid Natural Gas*.